

ANALISIS PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DI BADAN PENDAPATAN DAERAH (BAPENDA) KABUPATEN KOLAKA

Enjois Rongre Pandin¹; Neks Triani²; Surianto Ilham³

Universitas Sembilanbelas November Kolaka
Jln. Pemuda No. 339 Kolaka Sulawesi Tenggara
E-mail : rongreenjois@gmail.com (Koresponding)

Abstract: This study aims to analyze the implementation of Government Accounting Standards (SAP) in the preparation of financial statements at the Regional Revenue Agency of Kolaka Regency. SAP serves as an important guideline in realizing transparency and accountability in regional financial management. This study was conducted using a qualitative method. The data sources used in this research include primary and secondary data. In collecting data, the researcher employed observation, interviews, and documentation techniques. The research was carried out at the office of the Regional Revenue Agency of Kolaka Regency. The analysis results indicate that, in general, the Regional Revenue Agency of Kolaka Regency has implemented accrual-based SAP in accordance with Government Regulation Number 71 of 2010. However, there are still several obstacles affecting the effectiveness of its implementation, including limitations in human resources (HR) with competencies in public sector accounting, suboptimal financial information systems, and the need for technical adjustments in understanding reporting formats and procedures. Additionally, coordination between accounting entities and main reporting entities needs to be strengthened to produce financial statements that are more accurate, relevant, and timely. Based on these findings, this study recommends enhancing HR capacity through specialized training, strengthening information systems, continuous internal evaluation and supervision, as well as improving cross-unit coordination so that the implementation of SAP can run more optimally and support the achievement of good governance within the Kolaka Regency Government environment.

Keywords: *Government Accounting Standards, Financial Statements, Local Government, Regional Revenue Agency, Accrual-Based SAP*

Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan merupakan fondasi penting bagi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. Sebagai pedoman, pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2015 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), yang menjadi acuan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Laporan yang dimaksud mencakup Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, serta Catatan atas Laporan Keuangan. Dalam SAP, digunakan pendekatan Basis Kas Menuju Akruwal (Cash Toward Accrual), yakni laporan anggaran mengenai pendapatan dan belanja disusun dengan basis kas, sementara neraca yang berisi aset, ekuitas, dan kewajiban disajikan menggunakan basis akruwal (Agustina & Irawan, 2024).

Selanjutnya, Pasal 4 Ayat (1) menyebutkan jika pengimplementasian SAP berbasis akruwal dilakukan secara bertahap, yakni dari SAP berbasis kas menuju akruwal hingga sepenuhnya berbasis akruwal, sebagaimana diatur dalam PP No. 71 Tahun 2010 Pasal 7 Ayat (1). Oleh karena itu, SAP memiliki kekuatan hukum yang berfungsi mendorong peningkatan kualitas praktik akuntansi di lingkungan pemerintahan (Sari, 2018).

Pengimplementasian SAP yang berlandaskan akruwal mewajibkan pemerintah mencatat transaksi keuangan saat terjadinya, bukan hanya saat kas diterima atau dibayarkan tetapi juga melihat bagaimana aset dan kewajiban perusahaan berubah seiring waktu. Pendekatan ini memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai posisi

keuangan pemerintah, termasuk aset, kewajiban, dan ekuitas. Pengimplementasian SAP di pemerintah daerah bertujuan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan agar lebih relevan dan andal dalam pengambilan keputusan. Laporan keuangan yang disusun berdasarkan SAP mencakup Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Saldo Anggaran (LPSA) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Dengan adanya SAP, pemerintah daerah diharapkan dapat menyajikan laporan keuangan yang memberikan informasi lebih akurat mengenai pendapatan, belanja, aset, kewajiban, serta perubahan ekuitas.

Meskipun pengimplementasian SAP telah diwajibkan secara nasional, banyak pemerintah daerah masih menghadapi berbagai tantangan dalam implementasinya. Berbagai kendala teknis dan non-teknik seringkali muncul dalam proses pengimplementasiannya. Salah satu kendala utamanya adalah keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten dalam bidang akuntansi pemerintahan. Studi oleh (Risnangsih, 2016) mengidentifikasi jika kurangnya staf yang berkualitas menjadi hambatan signifikan dalam pengimplementasian SAP berbasis akrual di pemerintah daerah.

Selain itu faktor sumber daya manusia, kendala sistem informasi juga menjadi perhatian serius. Perbedaan sistem dan kebijakan akuntansi antar pemerintah pusat dan daerah dapat menghambat konsolidasi laporan keuangan. Rendahnya kualitas dan ketepatan waktu penyampaian data dari pemerintah daerah, serta belum terintegrasinya Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) dengan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD), menyebabkan penyusunan laporan keuangan seringkali dilakukan secara manual, meningkatkan resiko kesalahan dan ketidaktepatan informasi (Putra & Varina, 2021).

Dalam konteks lokal, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Kolaka memiliki peran strategis dalam mengelola pendapatan asli daerah dan menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan SAP. Bapenda merupakan lembaga yang memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan penerimaan pendapatan daerah. Dinas pendapatan daerah (DISPENDA) adalah nama sebelumnya dari lembaga ini. Sebagai instansi yang bertanggung jawab atas pemungutan pajak dan retribusi, Bapenda dituntut untuk menyajikan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel. Namun, seperti banyak pemerintahan daerah lainnya, Bapenda Kabupaten Kolaka menghadapi berbagai tantangan dalam pengimplementasian SAP berbasis akrual.

Dalam konteks pemerintahan, tahun anggaran biasanya berakhir pada 31 desember, lama waktu yang diberikan kepada Bapenda untuk menyusun dan menyampaikan laporan keuangan yaitu 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir, sehingga Bapenda harus menyelesaikan dan menyampaikan laporan keuangan selambat-lambatnya pada 31 maret tahun berikutnya. Namun hasil penelaan terhadap laporan keuangan tahun 2021 baru ditandatangani pada tanggal 3 juni 2022, sementara laporan keuangan 2022 ditandatangani pada tanggal 12 mei 2023. Hal ini mengindikasikan adanya keterlambatan dalam proses pelaporan yang tidak sesuai pada ketentuan waktu yang berlaku. Ketentuan ini umumnya mengacu pada peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan daerah, seperti undang-undang No 17 Tahun 2023 tentang keuangan negara dan peraturan pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), yang mewajibkan penyampaian laporan keuangan dalam jangka waktu tertentu setelah tahun anggaran berakhir.

Menurut salah satu staf keuangan di Bapenda salah satu masalah yang di dapat adalah terjadinya realisasi biaya

transportasi yang melebihi anggaran yang telah direncanakan. Dalam akuntansi, perbedaan ini dikenal dengan istilah selisih tidak menguntungkan, yaitu kondisi ketika realisasi anggaran yang lebih tinggi daripada yang dianggarkan. Fenomena ini mengindikasikan adanya potensi ketidak efisienan dalam perencanaan anggaran dan perlu dilakukan analisis lebih lanjut untuk mengetahui penyebabnya, apakah karena adanya perubahan harga, kesalahan estimasi awal, atau faktor operasional lainnya.

METODE

Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif sebagai dasar penelitian. Pendekatan tersebut berorientasi pada upaya menggambarkan secara menyeluruh dan mendalam kondisi partisipan atau subjek penelitian dalam konteks yang alami dengan menggunakan metode yang juga bersifat alamiah (Alasan, 2021). Adapun jenis pendekatan yang diterapkan adalah kualitatif deskriptif, yaitu penelitian yang ditujukan untuk menjelaskan suatu gejala atau keadaan secara rinci, sistematis, dan terstruktur (Zuliyana dkk., 2023). Melalui pendekatan ini, penulis berusaha memahami sekaligus mendeskripsikan pengimplementasian Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dalam penyusunan laporan keuangan pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Kolaka, sesuai dengan kapasitas yang dimiliki.

HASIL

Penyusunan laporan keuangan di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Kolaka mengacu pada ketentuan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Sebagai bagian dari organisasi perangkat daerah (OPD), Bapenda berperan sebagai lembaga akuntansi yang memiliki tanggung jawab untuk menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kepada entitas pelaporan utama, yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka.

Dari hasil wawancara dengan informan yaitu salah satu staf mengatakan jika Proses penyusunan laporan keuangan di Bapenda dilakukan secara tahunan dan dimulai dengan pengumpulan data keuangan dari seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pendapatan daerah.

Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) berfungsi menyajikan gambaran mengenai pelaksanaan pendapatan, belanja, transfer, surplus atau defisit, serta pembiayaan pada suatu entitas pelaporan, yang seluruhnya dibandingkan dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan. Melalui LRA, diperoleh informasi penting yang dapat digunakan untuk memprediksi ketersediaan sumber daya ekonomi yang akan mendukung aktivitas pemerintah pusat maupun daerah pada periode berikutnya, karena penyajiannya dilakukan dengan format perbandingan (Afriyeni dkk., 2024). Sebagai ilustrasi, berikut disajikan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kolaka per 31 Desember 2021 dan 2020.

Tabel 4. 1 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah per 31 Desember 2021 dan 2020

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
PENDAPATAN	55.296.801.783,00	40.543.248.277,00	73,32	36.773.271.949,00
Pendapatan Asli Daerah	55.296.801.783,00	40.543.248.277,00	73,32	36.773.271.949,00
BELANJA	12.002.869.636,00	11.241.786.608,00	93,66	14.464.988.083,00
Belanja Operasi	11.345.966.636,00	10.590.388.408,00	93,34	10.841.512.983,00
Belanja Pegawai	7.342.773.536,00	6.749.769.480,00	91,92	6.396.830.015,00
Belanja Barang dan Jasa	4.003.193.100,00	3.840.618.928,00	95,94	4.444.682.968,00
BELANJA MODAL	656.903.000,00	651.398.200,00	99,16	3.623.475.100,00
JUMLAH BELANJA	12.002.869.636,00	11.241.786.608,00	93,66	14.464.988.083,00
Sisa Lebih Pembayaran Anggaran (SILP)	43.293.932.147,00	29.301.461.664,00	67,68	22.308.283.866,00

Sumber: Data diolah penulis, 2025

Dapat disimpulkan jika Laporan Realisasi Anggaran pada Badan Pendapatan Daerah telah memenuhi ketentuan

pengimplementasian SAP yang berlaku, khususnya dalam hal pengakuan berbasis kas, klasifikasi pendapatan dan belanja, penyajian surplus/defisit anggaran, dan penyajian data komparatif. Dapat dikatakan Laporan operasional pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kolaka telah menerapkan SAP yang berlaku searah pada PSAP No 01 tentang penyajian laporan keuangan, sehingga dapat di sajikan sebagai acuan dalam penilaian kinerja keuangan daerah dan pengambilan keputusan.

Neraca

Neraca ialah bagian dari laporan keuangan yang mengindikasikan posisi keuangan suatu entitas pelaporan berkaitan dengan aset, kewajiban, serta ekuitas. Neraca pada Badan Pendapatan Daerah telah menyajikan aset yang mencakup aset lancar, aset tetap, sekaligus aset lainnya. Kewajiban mencakup kewajiban jangka pendek dengan detail yang terperinci, sementara kewajiban jangka panjang menunjukkan nilai nol. Ekuitas/dana menunjukkan perubahan saldo terakhir dari tahun 2020 ke 2021 serta disajikan sejalan pada kepatuhan SAP. Hal ini juga searah pada pendapat (Afriyeni dkk., 2024), jika neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu. Berikut laporan Neraca pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kolaka per 31 desember 2021 dan 2020

Tabel 4. 2 Laporan Neraca Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kolaka Per 31 Desember 2021 dan 2020

Uraian	2021	2020
ASET		
ASET LANCAR		
Piutang Pajak PBB		
Piutang Pajak PPJ		
Piutang Lainnya/Losd Pasar		
Penyisihan Piutang PBB		
Penyisihan Piutang PPJ	7.012.924.977,00	6.418.035.087,00
Penyisihan Piutang Losd Pasar	23.195.613.926,00	2.146.749.230,00
JUMLAH PIUTANG NET	3.324.309.900,00	3.245.055.700,00
Persediaan	4.034.485.411,83	(3.918.280.792,60)
JUMLAH ASET LANCAR	(115.978.069,63)	(10.733.746,15)
	(977.649.820,00)	(691.135.352,50)
	28.404.735.501,54	7.189.690.125,75
JUMLAH ASET	44.579.000,00	40.147.200,00
LANCAR	28.449.314.501,54	7.229.837.325,75

ASET TETAP		
Tanah		
Peralatan dan Mesin		
Gedung dan Bangunan		
Jalan, Irigas, dan Jaringan	6.878.357.000,00	6.384.707.500,00
Akumulasi Penyusutan	4.095.063.514	5.501.750.814,00
JUMLAH ASET TETAP	7.759.714.020,00	33.639.358.928,00
	166.677.240,00	6.578.530.240,00
	(4.571.891.169,00)	(19.082.513.565,00)
	14.327.920.605,00	33.021.833.917,00
ASET LAINNYA		
Aset Lain-lain		3.260.990.198,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	4.791.654.198,00	3.260.990.198,00
	(1.502.687.810,00)	
JUMLAH ASET LAINNYA	3.288.966.388,00	
JUMLAH ASET	46.066.201.494,54	43.512.661.440,75
KEWAJIBAN		
Pedapatan Diterima Dimuka	69.133.363,67	199.528.465,00
Utang Belanja (Insentif) dan Jasa Upah Pungut	444.119.708	671.820.072,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	513.253.071,67	871.348.537,00
JUMLAH KEWAJIBAN	513.253.071,67	871.348.537,00
EKUITAS		
Ekuitas RK PPKD	74.854.410.086,87	64.949.596.769,75
	(29.301.461.664,00)	(22.308.283.866,00)
JUMLAH EKUITAS	45.552.948.422,87	42.641.312.903,75
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	46.066.201.494,54	43.512.661.440,75

Sumber: Data diolah penulis, 2025

Laporan Neraca Pada Badan pendapatan Daerah Kabupaten Kolaka sudah searah pada PSAP No 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan yang berlaku karena telah mencantumkan semua unsur yang dicakup.

Laporan Operasional

Laporan operasional merupakan dokumen yang menyampaikan informasi terkait semua aktivitas operasional keuangan entitas yang melaporkan. Peraturan pemerintan No. 71 Tahun 2010, pada laporan operasional (LO) menyajikan pos-pos yaitu pendapatan-LO, beban operasional, surplus/defisit-LO dari sebuah entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode . Dalam laporan operasional pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten kolaka untuk tahun yang berakhir pada 31 desember 2021 dibandingkan tahun 2020, terdapat sejumlah

perubahan penting dalam pendapatan dan biaya operasional. Secara substansi sangat sesuai dengan penjelasan umum tentang laporan operasional dan deriisi pendapatan-LO beban yang tercantum dalam penelitian sebelumnya. Laporan ini berhasil memberikan ringkasan mengenai penambahan dan pemanfaatan sumber daya ekonomi yang berpengaruh pada ekuitas. Perbedaan yang signifikan terletak pada hilangnya kategori “transfer” dan ‘pos-pos luar biasa” dalam laporan yang disediakan. Berikut Laporan Operasional pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kolaka per 31 desember 2021 dan 2020

Tabel 4.3 Laporan Operasional Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kolaka Per 31 Desember 2021 dan 2020

Uraian	2021	2020	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
Kegiatan Operasional				
Pendapatan - LO	62.396.652.159,33	37.868.080.392,42	24.528.571.766,91	64,77
Beban	11.466.078.772,31	14.166.216.518,97	(2.700.137.746,66)	(19,06)
Beban Operasi	10.352.729.043,00	11.515.120.455,00	(1.162391.412,00)	(10,09)
Beban Penyusutan dan Amortisasi	419.235.967,00	1.695.840.053,00	(1.276.604.086,00)	(75,28)
JUMLAH BEBAN	11.466.078.772,31	14.166.216.518,97	(2.700.137.746,66)	(19,06)
SURPLUS/D EFISIT-LO	50.930.573.387,02	23.701.863.873,45	27.228.709.513,57	114,88

Sumber: Data diolah penulis, 2025

Secara umum, bisa dikatakan jika Laporan Operasional Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kolaka mengindikasikan pemahaman dan implementasi yang baik terhadap prinsip-prinsip Laporan Operasional yang searah pada Standar Akuntansi Pemerintahan. Dapat disimpulkan jika Laporan Operasional pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kolaka telah sesuai dengan PSAP No 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan yang mengatur penyusunan laporan keuangan.

Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas adalah dokumen keuangan yang menggambarkan

perubahan ekuitas suatu entitas dari awal hingga akhir periode tertentu. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 laporan ini menjelaskan elemen yang mengakibatkan variasi nilai ekuitas seperti surplus/defusit, koreksi, dan ekuitas akhir. Laporan perubahan ekuitas pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kolaka secara umum sangat konsisten dan menyeluruh dalam memenuhi ketentuan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) sesuai yang telah dicantumkan pada penjelasan penelitian terdahulu. Berikut Laporan Perubahan Ekuitas pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kolaka per 31 desember 2021 dan 2020.

Tabel 4. 4 Laporan Perubahan Ekuitas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kolaka Per 31 Desember 2021 dan 2020

Uraian	2021	2020
Ekuitas Awal		
Surplus/Defisit-Lo	42.641.312.903,75	40.355.724.448,99
Penambahan Nilai Aset Tetap/Penilaian tanah Tahun 2021	50.930.573.387,02	23.701.863.873,45
Pengurangan Nilai Aset Tetap/reklas ke perindang	5.966.607.000,00	391.600.000,00
Penyesuaian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap TA 2020	(38.287.916.908,00)	(724.997.088,00)
Penyesuaian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap TA 2020	14.902.015.505,00	567.146.149,00
Penyesuaian Akumulasi Penyusutan Aset Ekst Lain-lain	(1.474.844.952,00)	577.901.981,00
Extra Comptabel (Persediaan Penghapusan)	(10.872.000,00)	-
Beban Penyisihan Piutang Losd Pasar	72.027.497,50	27.888.170,00
Penyesuaian Piutang PPJ	103.389.108,45	52.469.235,31
Koreksi Atas Pengakuan Utang Insentif Tahun 2021	10.733.746,15	-
	1.384.799,00	-
EKUITAS AKHIR	74.854.410.086,87	64.949.596.769,75

Sumber: Data diolah penulis, 2025

Laporan Perubahan Ekuitas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kolaka secara keseluruhan merupakan contoh yang baik dalam pengimplementasian SAP yang relevan untuk komponen laporan keuangan tersebut. Sehingga dapat di simpulkan jika

Laporan Perubahan Ekuitas Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kolaka telah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah searah pada PSAP No 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan yang berlaku.

Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan untuk Laporan Keuangan Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kolaka menjelaskan secara umum mengenai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kolaka, termasuk aspek hukum, kebijakan akuntansi, serta rincian pos-pos yang terdapat dalam laporan keuangan. Sejalan pada ketentuan hukum yang berlaku, dalam penyajian Laporan Operasional, pendapatan dan biaya diakui berdasarkan dasar akrual, yaitu ketika pendapatan diterima dan biaya dikeluarkan serta kewajiban timbul tanpa memperhatikan waktu kas atau setara diterima atau dikeluarkan.

PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengimplementasian Standar akuntansi pemerintah di badan pendapatan daerah kabupaten kolaka yang merujuk pada kendala atau tantangan yang di hadapi dalam penerapannya. Di badan pendapatan daerah kabupaten kolaka telah menerapkan satandar akuntansi pemerintah berbasis akrual. Dalam pengimplementasian SAP,terdapat berbagai kendala atau tantangan yang dapat dihadapi dalam penerapannya,seperti keterbatasan sumberdaya manusia, perubahan kebijakan terkait standar akuntansi pemerintah, dan kurangnya sistem informasi yang mendukung. Badan Pendapatan Daerah kabupaten kolaka masih mengalami kendala atau tandangan dalam pengimplementasian standar akuntansi pemerintah seperti pada keterbatasan SDM. Sementara dua kendala lainnya tidak menjadi penghambat besar dalam pengimplementasian SAP. Uraian lebih detail terkait perihal ini yaitu seperti berikut:

Kerbatasan Sumber Daya Manusia

Dalam pengimplementasian standar akuntansi pemerintah (SAP) keterbatasan sumber daya manusia sering menjadi salah satu tantangan utama. Keterbatasan ini mencakup jumlah karyawan yang kurang, berbagai kualitas kompetensi, dan pemahaman teknis yang lebih baik. Untuk menggunakan SAP, kebanyakan orang membutuhkan kemampuan akuntansi, pemahaman tentang peraturan keuanan pemerintah dan keterampilan menggunakan teknologi informasi pendukung.

Berdasarkan hasil wawancara dengan JF Perencanaan Ahli Muda Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kolaka, diketahui jika salah satu kendala yang dihadapi dalam pengimplementasian standar akuntansi pemerintah di badan pendapatan daerah kabupaten kolaka adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM). Masih kurangnya SDM yang memiliki pengetahuan dan pemahaman mendalam terkait prinsip-prinsip akuntansi pemerintah, klasifikasi akun, serta penyusunan laporan keuangan sejalan pada standar yang berlaku. Diketahui tidak semua pegawai memiliki latar belakang pendidikan akuntansi sektor publik maupun pengalaman yang relevan, dan pemahaman terhadap penyusunan laporan berbasis akrual. Selain itu, belum tersedianya program pelatihan khusus mengenai pengimplementasian SAP juga menjadi faktor penghambat peningkatan kompetensi pegawai. Minimnya pelatihan khusus berdampak pada rendahnya pemahaman pegawai mengenai proses pengakuan pendapatan dan belanja berbasis akrual, pembuatan neraca dan penyajian laporan perubahan ekuitas yang informatif dan dapat dipertanggungjawabkan.

Perubahan Kebijakan Terkait standar Akuntansi Pemerintah

Di Indonesia, kebijakan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) mengalami pergeseran dari basis kas menuju akrual menjadi basis akrual penuh (PP Nomor 24

Tahun 2005) dan kembali ke basis akrual penuh (PP Nomor 71 Tahun 2010). Perubahan ini dilakukan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas laporan keuangan pemerintah. Namun demikian, implementasi SAP berbasis akrual membutuhkan persiapan kelembagaan dan teknis, termasuk kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur sistem informasi, dan standar prosedur pelaporan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan JF Perencanaan Ahli Muda Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kolaka, diketahui jika dalam hal pengimplementasian kebijakan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kolaka tidak mengalami kesulitan yang signifikan. Hal ini mengindikasikan jika Bapenda telah berusaha untuk menyesuaikan diri dengan peraturan terbaru. Namun, untuk menerapkannya secara praktis, masih diperlukan beberapa penyesuaian teknis. Yang paling penting adalah pemahaman tentang perubahan dalam format pelaporan keuangan dan cara membuat laporan yang searah pada sistem akuntansi berbasis akrual. Salah satu perubahan yang perlu diperhatikan adalah jika Bapenda tidak dapat mengelola kas dan saldo anggaran.

Kurangnya Sistem Informasi Yang Mendukung

Salah satu kendala umum dalam pengimplementasian Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) di berbagai instansi pemerintah daerah adalah terbatasnya sistem informasi yang memadai. Sistem informasi yang belum lengkap atau belum terintegrasi sering kali menyulitkan proses pencatatan, pengolahan, dan pelaporan data keuangan sesuai ketentuan akuntansi berbasis akrual.

Berdasarkan hasil wawancara dengan JF Perencanaan Ahli Muda Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kolaka, diketahui jika salah satu kendala teknis dalam penyusunan laporan keuangan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kolaka adalah keterbatasan sistem informasi yang digunakan. Secara umum, pengimplementasian Sistem Informasi

Pemerintahan Daerah (SIPD) di tingkat daerah telah membantu standarisasi format laporan keuangan dan mempermudah pelaporan berjenjang dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat. Temuan di lapangan mengindikasikan jika fitur-fitur yang tersedia dalam SIPD masih belum sepenuhnya mampu menampung seluruh kebutuhan teknis penyusunan laporan keuangan searah pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Beberapa keterbatasan fitur membuat proses input data dan klasifikasi transaksi menjadi kurang fleksibel, sehingga berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian pada beberapa tahap pelaporan. Meskipun demikian secara keseluruhan, SIPD tetap menjadi alat yang berguna untuk mendukung integrasi data keuangan daerah di seluruh negeri.

SIMPULAN

Mengacu pada analisis dan hasil kajian terkait Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kolaka telah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual, searah pada amanat Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) sebagaimana di atur dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010. Pencatatan dan penyusunan laporan keuangan dilakukan melalui proses yang mencakup perencanaan anggaran, realisasi belanja hingga penyusunan laporan pertanggungjawaban. Proses ini di dukung dengan penggunaan aplikasi seperti SIPD meskipun masih ada fitur yang belum sepenuhnya menampung kebutuhan secara komprehensif.

Dalam hal kesesuaian dengan SAP, ditemukan jika pengimplementasian SAP di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten kolaka telah sesuai dengan Ketentuan yang ada. Meskipun dalam pengimplementasiannya masih ada tantangan serta kendala yang dihadapi seperti: (1) Keterbatasan Sumber Daya Manusia, (2) Peruban Kebijakan (3) Keterbatasan Sistem Informasi.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai penerapan standar akuntansi pemerintah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kolaka,

maka penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk perbaikan dan peningkatan sistem akuntansi pemerintah di lingkungan tersebut: (1) Memprioritaskan program peningkatan kapasitas pegawai melalui pelatihan teknis yang rutin dan bersertifikat mengenai pengimplementasian SAP berbasis akrual. (2) Peningkatkan pengembangan dan optimalisasi aplikasi SIPD agar fiturnya semakin mendukung kebutuhan penyusunan laporan keuangan berbasis SAP, termasuk keandalan server dan kecepatan akses. (3) Mengadakan sosialisasi berkala terkait kebijakan SAP berbasis akrual kepada seluruh pegawai, terutama ketika terdapat perubahan regulasi atau pembaruan sistem. (4) Menetapkan sistem evaluasi dan monitoring pengimplementasian SAP secara berkala untuk menilai sejauh mana pelaksanaan penyusunan laporan keuangan telah searah pada peraturan yang berlaku.

DAFTAR RUJUKAN

- Afriyeni, P., Zuliyana, S., Asrina, S., & Syaherwandi (2024). Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan Dan Tata Kelola Perusahaan (Jakpt)*, 1(4).
- Agustina, M. A., & Irawan, B. (2024). Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis. *Jurnal Tanjak*, 1(1). [Www.investopedia.com/terms/a/accrualaccounting.asp](http://www.investopedia.com/terms/a/accrualaccounting.asp).
- Alaslan, A. (2021). Metode Penelitian Kualitatif. *Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan(Kdt)*.
- Mumu, P., Kalangi, L., & Kapojos, P. M. (T.T.). Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (Sap) Berbasis Akrual Pada Laporan Keuangan Daerah Kecamatan Langowan Barat Kabupaten Minahasa. *Jurnal Lppm Bidang Ekososbudkum (Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Hukum)*, 7(3), 2023.
- Nasution, Dr. A. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. Harfa Creative.
- Nopitasari, Y. (2022). Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Dalam Penyusunan Laporan Operasional Berbasis Akrual Pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi. *Niversitas Islam Kuantan Singingi*.
- Afiyah, S., Arsy, A. A., & Engkus. (2021). Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (Psap) Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Cibugel Kabupaten Sumedang. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(4).
- Agustina, M. A., & Irawan, B. (2024). Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis. *Jurnal Tanjak*, 1(1). [Www.investopedia.com/terms/a/accrualaccounting.asp](http://www.investopedia.com/terms/a/accrualaccounting.asp).
- Alaslan, A. (2021). Metode Penelitian Kualitatif. *Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan(Kdt)*.
- Kaifah, U., & Tryana, A. L. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa. *Journal Of Accounting, Finance And Auditing*, 2(2), 26–37.
- Mulyati, E., Rifandi, M., & Anam, C. (2023). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta. *Ulilalbab:Jurnalilmiah Multidisiplin*, 2(7).
- Mumu, P., Kalangi, L., & Kapojos, P. M. (T.T.). Analisis

- Pengimplementasian Standar Akuntansi Pemerintahan (Sap) Berbasis AkruaI Pada Laporan Keuangan Daerah Kecamatan Langowan Barat Kabupaten Minahasa. *Jurnal Lppm Bidang Ekososbudkum (Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Hukum)*, 7(3), 2023.
- Nasution, Dr. A. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. Harfa Creative.
- Nopitasari, Y. (2022). *Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Dalam Penyusunan Laporan Operasional Berbasis AkruaI Pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi*. Niversitas Islam Kuantan Singingi.
- Putra, S. A., & Varina, R. J. (2021). *Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Daerah Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu*. *Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau*, 1(2). <https://doi.org/10.33701/jtpm.v1i2.2071>
- Risnaningsih. (2016). *Implementasi Dan Kendala Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis AkruaI*. Eksis, Xi(2).
- Sitanggang, J. Y. B., Tohang, L. B., Simatupang, Y., & Nasirwan. (2025). *Hambatan Dan Inovasi Dalam Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Laporan Keuangan*. *Jurnal Ilmiah Nusantara (Jinu)*, 2(2).
- Zuliyana, S., Mawaddah, A., & Hartati, R. (2023). *Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (Sap) Pada Laporan Keuangan Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu*. *Shafin: Sharia Finance And Accounting Journal*, 3(1).